



News Title : Cegah Potensi Kerugian, Bappebti Blokir 1.327 Domain Situs Entitas Ilegal PBK

Media Name : rmol.id

Journalist : -

Publish Date : 16 August 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Politik

Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Politik

Read English Version

Cegah Potensi Kerugian, Bappebti Blokir 1327 Domain Situs Entitas Ilegal PBK

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
Rabu, 16 Agustus 2023, 04:04 WIB



Rustrasi/Net

REPUBLIKMERDEKA Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), memblokir 1327 domain situs entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada Januari-Agustus 2023.



BERTA TERKAIT:

- Cegah Potensi Kerugian, Bappebti Blokir 1327 Domain Situs Entitas Ilegal PBK
- Perhatikan 2L, Sebelum Investasi pada Aset Kripto
- Banyak Manfaat, Bappebti Hati-hati Susun Rancangan Kebijakan Ekspor CPO
- Bappebti Tetapkan Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto
- Bappebti Blokir Ribuan Domain Situs Web Entitas Ilegal

Pemblokiran dilakukan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat," tegas Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Meskipun Bappebti telah memblokir domain situs entitas ilegal, masih banyak ditemukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK ilegal di tengah masyarakat.

Didit menekankan kepada entitas-entitas ilegal yang telah diblokir tersebut agar mengajukan permohonan perizinan kepada Bappebti dan menurunkan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelahnya, kata Didit lagi, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti.

BACA JUGA:

- Wamendag Jerry Sambuaga Beri Tips Aman Memulai Investasi Kripto

Berikutnya, kata dia, semua harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya," pungkasnya.

EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK